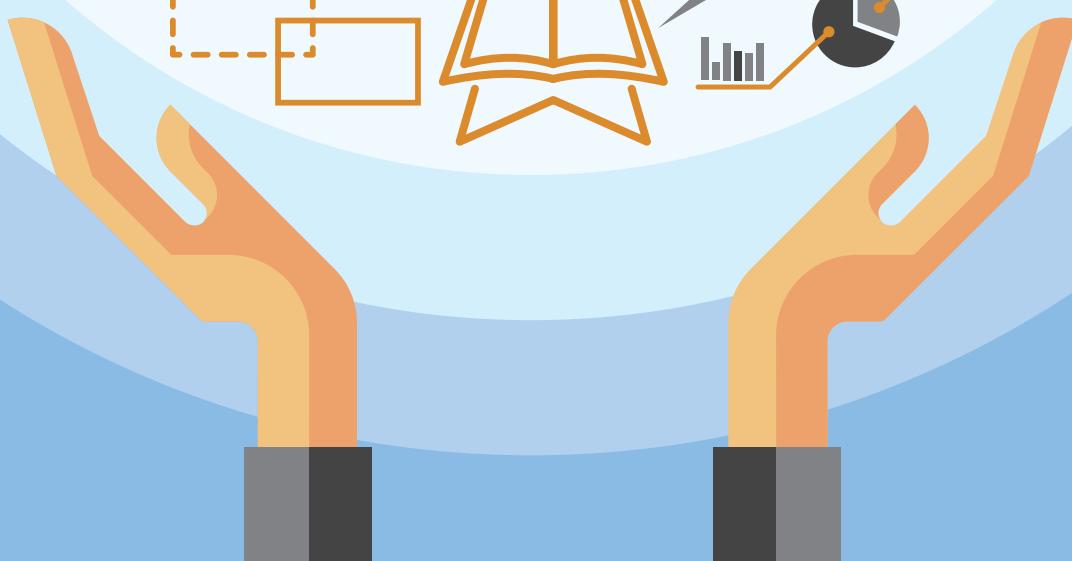
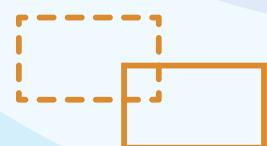


2019

LAPORAN KEBERLANJUTAN
PROGRAM KEMASLAHATAN BPKH



SINERGI UNTUK KEMASLAHATAN UMAT







SINERGI UNTUK KEMASLAHATAN UMAT

Sudah lebih dari satu tahun sejak diluncurkannya Program Kemaslahatan pada bulan Oktober 2018, sejak itu pula kami telah meletakkan pondasi kepedulian sosial untuk kemaslahatan umat. Kami menyadari untuk dapat membuat perubahan besar tidak dapat dilakukan sendiri. Sejalan dengan ajaran Rasulullah bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang saling memperkuat. Kami yakin mengedepankan sinergi dengan seluruh pihak yang terkait, dapat menjadi solusi dalam menjawab tantangan keberlanjutan. Selama tahun 2019, Bidang Kemaslahatan dalam menjalankan amanah telah berkolaborasi dengan berbagai mitra dengan satu tujuan meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.





Daftar Isi

3 Tema Laporan 2019

5 Daftar Isi

6 Sambutan Kepala Badan Pelaksana

8 Sambutan Deputi Bidang Pengembangan dan Kemaslahatan



10 Tentang Kami

- Sekilas Bidang Kemaslahatan BPKH
- Profil Bidang Kemaslahatan BPKH
- Visi dan Misi
- Ikhtisar Penting
- Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

18 Menyalurkan Nilai Manfaat

- Dana Abadi Umat (DAU)
- Program Kemaslahatan
- Kemitraan

30 Memulihkan Kehidupan Masyarakat Pasigala

- Bantuan Kemaslahatan Bencana PASIGALA
- Sinergi Bersama Mitra Kemaslahatan
- Kampung BPKH



36 Mengoptimalkan Insan Kemaslahatan

- Kepegawaian
- Pengembangan SDM

42 Tata Kelola Keberlanjutan

- Tata Kelola
- Manajemen Risiko
- Sistem Pengaduan
- Anti Korupsi
- Sistem Pelaporan Pelanggaran
- Pelibatan Pemangku Kepentingan

50 Tentang Laporan Keberlanjutan

- Tentang laporan keberlanjutan
- Kandungan Laporan dan Materialitas
- Proyeksi Program Kemaslahatan Tahun 2020
- Indeks Standar GRI
- Indeks POJK-51/2017

Sambutan Kepala Badan Pelaksana sekaligus bertindak sebagai Anggota Badan Pelaksana Bidang Pengembangan dan Kemaslahatan



Dr. Anggito Abimanyu, MSc

“

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. **Q.S An Nisa:58** ”

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Menurut UU 34 tahun 2014, tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan, pertama kualitas penyelenggaraan ibadah haji, kedua rasionalitas dan efisiensi BPIH dan ketiga, manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH.

Terkait dengan tujuan ketiga, sejak tahun 2018 BPKH telah melaksanakan kegiatan kemaslahatan umat Islam. Dalam UU 34 tahun 2014, terdapat 6 jenis kegiatan kemaslahatan yakni pelayanan ibadah haji, sarana dan pra-sarana ibadah, Pendidikan dan dakwah, kesehatan, ekonomi umat, dan sosial keagamaan. Pada tahun 2018, pelaksanaan kegiatan kemaslahatan berjumlah Rp. 590.300.000,- berupa bantuan di ruang lingkup pendidikan dan dakwah dalam mendukung penanganan bencana tsunami Palu Sigi dan Donggala.

Pada tahun 2019, BPKH telah melaksanakan 4 dari 6 jenis kegiatan. Alokasi tebesar adalah untuk jenis kegiatan pelayanan haji untuk memenuhi kebutuhan tambahan

kuota haji pada tahun tersebut, disamping kegiatan rehabilitas sarana prasarana di daerah bencana alam di Palu, Sigi dan Donggala, pendidikan dan dakwah, serta sosial keagamaan. Pada tahun 2020, BPKH melaksanakan seluruh kegiatan kemaslahatan. Namun demikian karena terjadi pandemi COVID-19, sebagian alokasi diperuntukkan penanganan COVID-19 kepada umat terdampak seperti bantuan sembako, penyediaan alat kesehatan, pembersihan atau desinfektan masjid, penyediaan ambulans dan bantuan hewan korban.

Bidang kemaslahatan telah memprakarsai penerbitan peraturan pelaksanaan kegiatan kemaslahatan. Pada tahun 2019 BPKH telah menerbitkan Peraturan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (PBPKH) Nomor 2 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (DAU).

Regulasi baru ini memuat aturan dan petunjuk teknis yang lebih rinci terkait penetapan dan pelaksanaan prioritas Program Kemaslahatan, ketentuan jenis



kegiatan, proses bisnis kegiatan kemaslahatan, efisiensi biaya dan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Regulasi ini juga berfungsi sebagai pedoman yang akan memandu bidang Kemaslahatan dalam memastikan seluruh program yang dilakukan di masing-masing jenis kegiatan dapat terukur pencapaian, bermanfaat, tepat sasaran serta sejalan dengan prinsip dalam kegiatan kemaslahatan.

Di tahun 2019, bidang Kemaslahatan juga terus meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanannya. Cakupan Program Kemaslahatan yang dilakukan lebih beragam dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sepanjang tahun 2019 total penyaluran nilai manfaat pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) oleh Program Kemaslahatan BPKH mencapai Rp 156,5 miliar. Nilai ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, alokasi anggaran kegiatan Kemaslahatan tersebut tidak cukup memberikan dampak yang besar bagi kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Alokasi kemaslahatan tahun 2019, proporsi 72% dialokasi untuk subsidi bagi Jemaah haji di Arab Saudi. Pada tahun 2020 diperkirakan akan dialokasikan sebesar Rp. 185 miliar yang didistribusikan secara merata baik jenis kegiatan maupun lokasi daerah penerima manfaat.

Salah satu inovasi yang mulai dilaksanakan pada tahun 2019 adalah kerjasama kemitraan dengan organisasi kemaslahatan umat dan lembaga amil zakat (LAZ) nasional dan provinsi yang telah lebih dulu berkiprah dan memiliki rekam jejak yang terpercaya. Ini telah menjadi bagian dari rencana strategis bidang Kemaslahatan dan juga rencana kedepan dalam meningkatkan kinerja Program Kemaslahatan. Pada tahun 2020, strategi dengan bersinergi bersama beberapa LAZ nasional dan provinsi tersebut akan terus dilaksanakan.

Kami meyakini menjalin jejaring kerjasama dengan lembaga LAZ tingkat nasional dan provinsi sebagai Mitra Kemaslahatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan kemaslahatan bagi umat Islam di pelosok Indonesia.

Berbagai program yang dilakukan sejak tahun 2018 juga merupakan kontribusi nyata Program Kemaslahatan dalam mendukung upaya pemerintah

mencapai sejumlah tujuan dalam pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Prioritas Program Kemaslahatan yang ditetapkan setidaknya turut berkontribusi pada 8 dari 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

Berbagai ikhtiar pemberian dan penyempurnaan yang kami lakukan sepanjang tahun 2019 ini tidak lain merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen bidang Kemaslahatan dan bidang pendukung lainnya agar dapat menjalankan mandat menyalurkan nilai manfaat pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) sebaik mungkin, maslahat dan tepat sasaran.

Tahun 2020, adalah tahun yang penuh tantangan bagi dunia, tidak terkecuali Indonesia. COVID-19 ditengarai tidak hanya memberikan dampak kesehatan namun juga diperkirakan dapat melumpuhkan ekonomi umat. Untuk itu Program Kemaslahatan BPKH akan hadir dan fokus pada kegiatan yang menitikberatkan pada penanganan COVID-19, kami mengambil peran dan mendukung pemerintah serta masyarakat secara luas untuk memulihkan kesehatan dan kesejahteraan umat.

BPKH senantiasa berupaya mewujudkan visi lembaga menjadi lembaga pengelola keuangan yang terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi Jemaah haji dan kemaslahatan umat. BPKH tidak hanya berfokus pada unit bisnis nilai manfaat setoran awal, melainkan juga dapat berkontribusi melalui kegiatan untuk kemaslahatan umat khususnya umat Islam secara adil dan merata.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama kepada mitra kemaslahatan dan penerima manfaat, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya selama ini.

Kami berharap agar kepercayaan dan dukungan tersebut terus diberikan sehingga BPKH semakin terpacu untuk mewujudkan Lembaga Pengelola Keuangan yang berkelanjutan.

Semoga Allah meridhoi ikhtiar kami. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dr. Anggito Abimanyu MSc

Sambutan Deputi Bidang Pengembangan dan Kemaslahatan



Hari Prasetya

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemangku Kepentingan yang Budiman.

Bidang Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali mempersesembahkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) tahun 2019. Pada edisi kedua laporan ini materi yang disajikan difokuskan hanya pada kinerja yang dilakukan oleh Bidang Kemaslahatan.

Sebagai bagian dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bidang Kemaslahatan mendapat mandat khusus untuk menyalurkan nilai manfaat dari pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) untuk kepentingan masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia. Laporan Keberlanjutan ini merupakan perangkat dan mekanisme kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat tersebut.

Laporan Keberlanjutan edisi 2019 ini disusun mengacu pada pelaporan berdasarkan GRI Standard dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/OJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Meski, sesungguhnya Bidang Kemaslahatan tidak menjadi subjek dari peraturan tersebut, namun karena sifat kegiatan yang dilakukan Bidang Kemaslahatan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial BPKH, maka kami merasa penting mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh OJK tersebut.

Melalui Laporan Keberlanjutan, kami menyajikan data dan informasi yang tidak hanya bersifat penyaluran dana kemaslahatan saja (*pure financial performance*) tapi uraian di dalamnya juga memuat informasi seputar hasil dan dampak yang dirasakan para penerima manfaat dari pelaksanaan Program Kemaslahatan yang kami lakukan.

Sesuai dengan tema yang diangkat pada Laporan Keberlanjutan periode ini "Sinergi untuk Kemaslahatan Umat", dalam menjalankan mandat sepanjang tahun 2019, kami telah memperluas jaringan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi kemaslahatan lain. Sebagai lembaga yang baru hadir kurang dari dua tahun lalu, kami menyadari adanya keterbatasan dari sisi pengalaman maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu kami perlu banyak belajar dan bekerja sama dengan organisasi lain yang memiliki pengalaman dan rekam jejak yang jauh lebih panjang serta mumpuni. Kami meyakini dengan membangun kerjasama dan kemitraan yang lebih luas ini kami dapat meningkatkan profesionalisme dan mendorong percepatan pembangunan kemaslahatan umat di tanah air.

Kami senantiasa berusaha agar sumber daya yang kami miliki dialokasikan pada kegiatan yang berkelanjutan (*sustainable*) sehingga hasil dan dampak yang diciptakan dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat. Program yang menciptakan nilai bagi seluruh pemangku



kepentingan baik dari sudut pandang ekonomi, sosial dan lingkungan. Kami selalu berupaya Program Kemaslahatan yang dilakukan di setiap asnaf/pilar dapat sejalan atau berkesesuaian dengan kampanye Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dilakukan pemerintah. Pada tahun 2019 ini program yang kami lakukan mampu mendukung 8 dari 17 tujuan pembangunan nasional.

Sebagai contoh, Bidang Kemaslahatan BPKH membangun dua kawasan pemukiman baru bagi penyintas bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan sekitarnya yang diberi nama 'Kampung BPKH'. Program ini menyediakan rumah tinggal baru bagi lebih dari 200 Kepala Keluarga (KK) penyintas yang dilengkapi dengan sarana prasarana vital seperti klinik kesehatan, masjid, pusat ekonomi dan sekolah. Dengan program tersebut warga yang direlokasi tidak hanya memiliki tempat berteduh tapi juga memiliki lingkungan tempat tinggal yang mendukung mereka untuk melakukan aktivitas sosial, ekonomi dan pendidikan. Dengan demikian warga yang direlokasi dapat melanjutkan kehidupan mereka kembali di lokasi baru yang aman dan nyaman pasca bencana.

Selain itu, Bidang Kemaslahatan juga telah memberikan bantuan pendanaan untuk membiayai renovasi dan pembangunan gedung sekolah, klinik kesehatan, asrama haji dan masjid/musholla. Seluruh kegiatan ini memiliki dampak yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Meski demikian, mandat yang dilimpahkan kepada kami juga memberikan ruang dan kewajiban untuk merespon kebutuhan mendesak yang terjadi di tengah masyarakat pada periode tersebut. Di tahun 2019, Program Kemaslahatan ikut berkontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Kami mengalokasikan bantuan dana yang cukup signifikan untuk mendukung kelancaran ibadah jemaah haji lansia di tanah suci berupa dukungan akomodasi.

Dalam melaksanakan mandat selama tahun 2019, Bidang Kemaslahatan BPKH juga mengalami sejumlah kendala dan tantangan. Di antaranya, kami masih belum dapat melaksanakan kegiatan pada asnaf Ekonomi Umat. Hal tersebut dikarenakan kami masih melakukan penjajakan dengan lembaga yang dibolehkan secara peraturan untuk melakukan kerjasama dalam pemberian fasilitas pembiayaan usaha mikro dan kecil serta *qordhul hasan* untuk bidang/asnaf Ekonomi Umat yakni Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). Kami berharap pada tahun mendatang kerjasama tersebut bisa dirampungkan sehingga Program Kemaslahatan yang kami lakukan menjadi optimal.

Bidang Kemaslahatan telah memiliki rencana strategis lima tahunan yang tertuang dan merupakan bagian dari rencana strategis BPKH 2019 – 2023, di masa mendatang kami berencana menyusun *roadmap* Bidang Kemaslahatan untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai turunan dari rencana strategis yang sudah ada. Hal ini bertujuan agar Program Kemaslahatan dapat dijalankan lebih komprehensif dan sistematis, sehingga hasil dan dampak yang diciptakan dari berbagai kegiatan yang didanai oleh Bidang Kemaslahatan BPKH dapat lebih baik dan lebih terukur secara kualitas maupun kuantitas. Kami juga melanjutkan pendekatan yang telah dilakukan di tahun ini, yaitu bekerja sama dengan mitra yang lebih luas lagi.

Akhirnya sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang mendukung kinerja kami di tahun 2019 ini. Semoga kerjasama dan dukungan yang telah terjalin dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Hari Prasetya

1

TENTANG KAMI



Sekilas Bidang Kemaslahatan

Bidang Kemaslahatan merupakan salah satu unit kerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Bidang ini mengemban tugas dan fungsi secara khusus dalam menyalurkan nilai manfaat yang bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU).

Melalui Bidang Kemaslahatan, BPKH menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjadikan BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan yang tidak hanya berfokus pada unit bisnis melainkan dapat berkontribusi melalui kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.





Profil Bidang Kemaslahatan



Kegiatan yang dijalankan

Menyalurkan nilai manfaat yang bersumber dari Dana Abadi Umat melalui kegiatan-kegiatan sosial untuk kemaslahatan umat Islam.

Alamat kantor pusat

Menara Bidakara 1, lantai 8
Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

Telp
(021) 83793001

Email
kemaslahatan@bpkh.go.id

Call Center Kemaslahatan
08882298820

Situs web
www.bpkh.go.id



Skala organisasi

Per 31 Desember 2019

Jumlah total karyawan : 6 orang

Nilai Dana Abadi Umat : 3,57 T

Pasar yang dilayani

Masyarakat di seluruh Indonesia
Jemaah haji di Indonesia dan di Arab Saudi

Wilayah operasional

Indonesia



Sifat organisasi dan dasar hukum

Bidang yang berada di bawah naungan badan hukum publik pengelolaan keuangan haji atau BPKH

Dasar hukum yang terkait dengan pembentukan Bidang Kemaslahatan:

1. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
3. Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji

Visi dan Misi

Berada dalam naungan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, kami turut berupaya untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan BPKH.



Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi Jemaah haji dan kemaslahatan umat.



1. Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern.
2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis.
3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas.
4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional.
5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Ikhtisar Penting



Perolehan Nilai
Manfaat DAU

Rp 223.753.032.351
2019

Rp 189.101.187.730
2018



Nilai Manfaat
Terdistribusi

Rp 156.539.827.041
2019

Rp 590.300.000
2018

Kinerja 2019



Sebaran wilayah penerima
manfaat di
15 Provinsi



Rehabilitasi **4** Asrama Haji,
9 Sekolah Islam, **8** Pondok Pesantren,
13 Mesjid, **2** Klinik Kesehatan



Bantuan akomodasi untuk
10.000 jemaah haji lansia
kuota tambahan



Hunian baru untuk **193**
Kepala Keluarga (KK) penyintas
bencana PASIGALA



20.000+
Penerima manfaat



Bantuan **11** kendaraan
operasional haji

Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai salah satu lembaga Pemerintah, Bidang Kemaslahatan BPKH turut mengambil peran dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui Program Kemaslahatan, kami turut berkontribusi dalam, setidaknya, 8 dari 17 tujuan.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



RUANG LINGKUP PROGRAM	PROGRAM KEMASLAHATAN	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG RELEVAN
Pelayanan Haji	Penyediaan akomodasi dan kendaraan operasional untuk jemaah haji lansia dan ambulans	 <p>Populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi untuk lansia</p>
Pendidikan dan Dakwah	Penyediaan laptop, pengadaan lab komputer Pembangunan ruang kelas baru Pembangunan asrama santri, Pembangunan sekolah darurat,	 <p>Sekolah dengan akses listrik, komputer serta fasilitas sanitasi dasar</p>
Sarana dan Prasarana	Pengadaan rumah ramah gempa dan air di Palu, Kampung BPKH	 <p>Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana</p>  <p>Populasi memiliki layanan air minum yang dikelola secara aman</p>  <p>Rumah tangga memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau</p>



RUANG LINGKUP PROGRAM	PROGRAM KEMASLAHATAN	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG RELEVAN
	Pembangunan sarana sanitasi	 <p>Mengurangi angka kematian akibat sanitasi tidak aman dan tidak higienis</p>  <p>Akses terhadap layanan sanitasi layak</p>
Kesehatan	MPASI bayi dan balita Lombok	 <p>Mengurangi prevalensi kekurangan gizi pada anak balita</p>
Laporan keuangan yang transparan		 <p>Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan lembaga</p>
Kemitraan dalam pelaksanaan Program Kemaslahatan		 <p>Komitmen kemitraan publik, swasta dan masyarakat sipil</p>

2

MENYALURKAN NILAI MANFAAT



PELETAKAN BATU PERTAMA
KAMPUNG BPKH

DONGGALA, 23 OKTOBER 2019



Dana Abadi Umat (DAU)

DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 diperoleh dari hasil pengembangan dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang yang sama diatur bahwa DAU merupakan bagian dari Dana Haji yang diamanahkan pengelolaannya kepada BPKH. Kementerian Agama mulai menyerahkan pengelolaan DAU kepada BPKH pada tahun 2018.



**Nilai Pokok DAU
(Rp)**

3.570.529.860.018

2019

3.483.740.762.715

2018



**Nilai Manfaat yang
Dihasilkan (Rp)**

223.753.032.351

2019

189.101.187.730

2018



**Nilai Manfaat yang
didistribusikan (Rp)**

156.539.827.041

2019

590.300.000

2018



**Sisa Nilai Manfaat
(Rp)**

67.213.205.310

2019

188.510.887.730

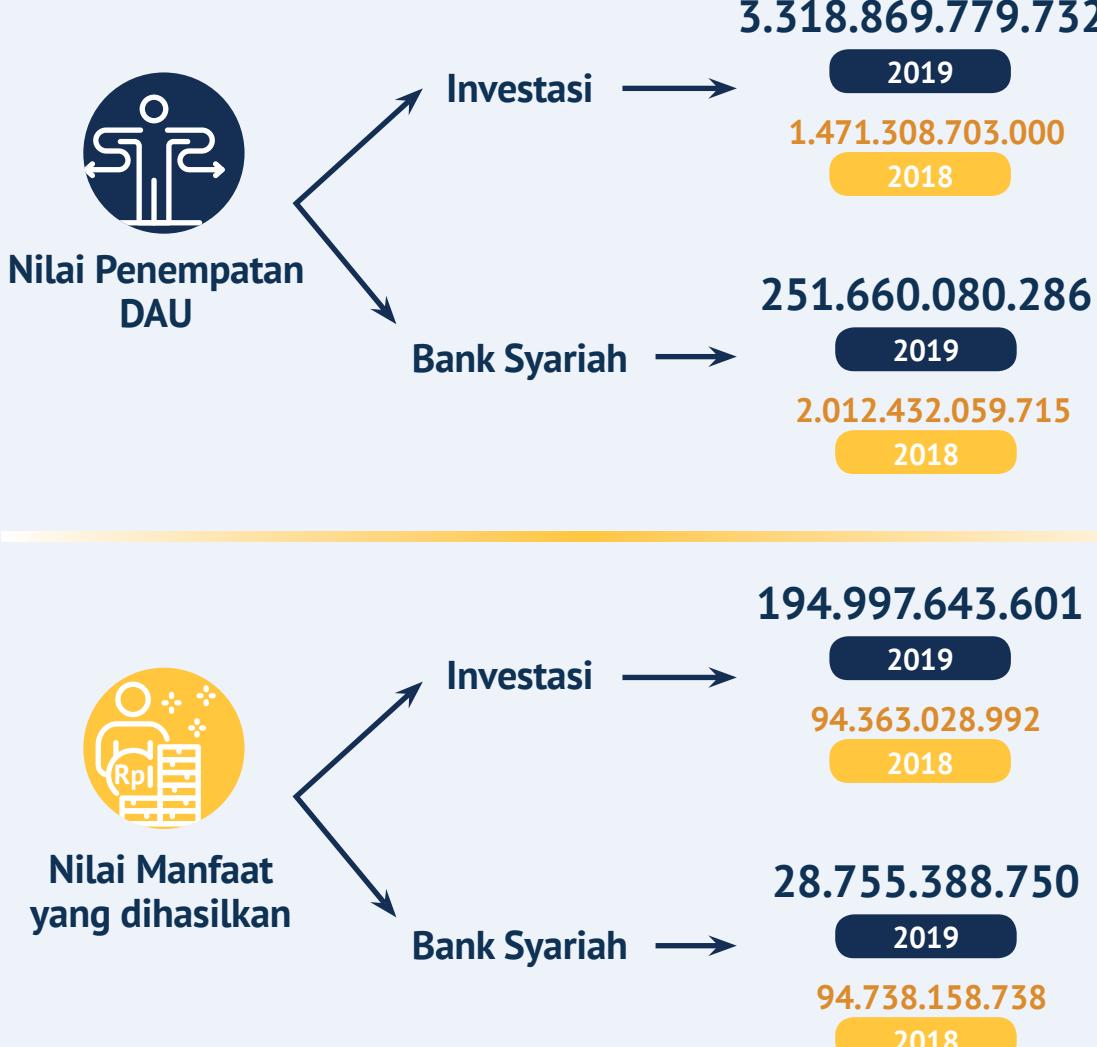
2018

Nilai manfaat atau hasil pengembangan DAU digunakan sebagai sumber pendanaan dalam kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Nilai manfaat DAU yang dapat digunakan paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya

Legitimasi penggunaan nilai manfaat DAU ini juga semakin dikuatkan oleh keputusan *ijtima* ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia ke VI tahun 2018 yang menetapkan penggunaan nilai manfaat DAU dibolehkan selama digunakan untuk kemaslahatan umat dengan baik. Dalam upaya menjaga keberlangsungannya, pokok DAU ditempatkan atau diinvestasikan pada instrumen yang memiliki tingkat atau profil risiko rendah.

Kriteria instrumen penempatan DAU diatur pada PP No.5/2018.

Pasal 26 dalam peraturan tersebut mengatur penempatan Dana Haji yang didalamnya mencakup DAU hanya dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah. Besaran porsi dana haji yang bisa diinvestasikan hanya sebesar 20% dari total dana haji. Investasi itu disebar sebanyak 50% pada instrumen perbankan melalui Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Lalu sebanyak 20% di sukuk, kemudian 5% di emas, 15% di investasi langsung, serta 10% di investasi lainnya.



Program Kemaslahatan

Program Kemaslahatan BPKH mulai diluncurkan pada akhir tahun 2018. Pelaksanaannya merupakan upaya lanjutan BPKH dalam mengimplementasikan Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Bidang Kemaslahatan menjadi bidang khusus yang membantu BPKH dalam menjalankan mandatnya menyalurkan nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan DAU untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam menjalankan mandat ini, Bidang Kemaslahatan merujuk pada prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Prinsip ini memandang tujuan dari penetapan sebuah hukum adalah untuk meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat alias kemaslahatan.

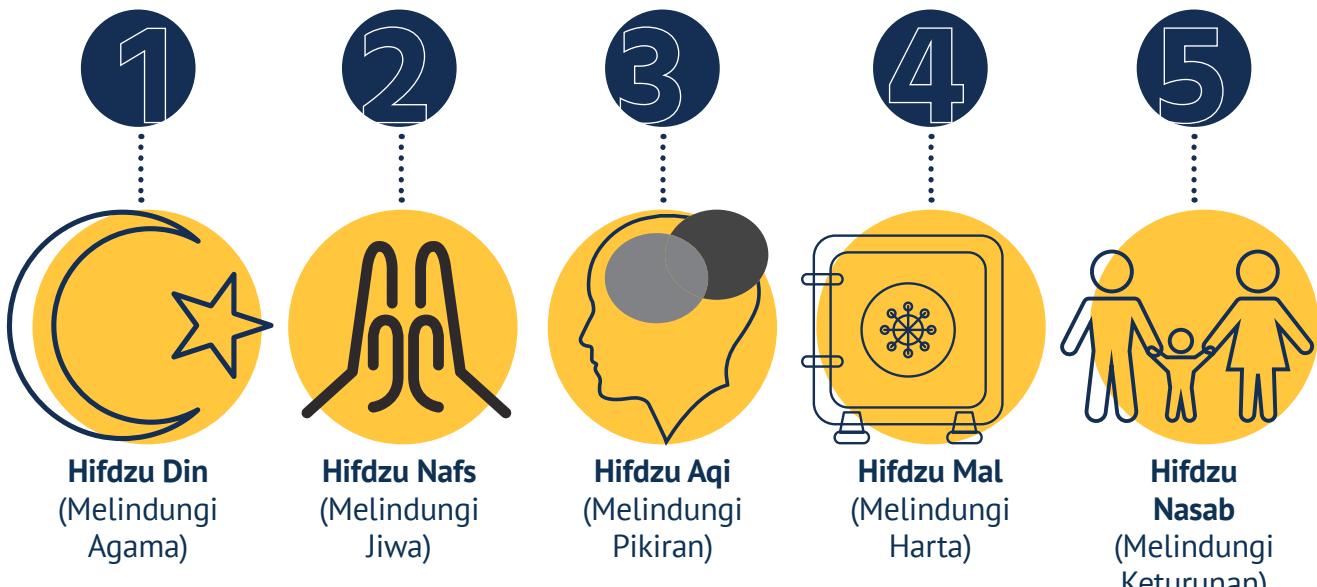
Maqashid Syariah meyakini ada 5 tujuan penetapan hukum yang kemudian disepakati menjadi lima pilar Program Kemaslahatan.



Dasar Hukum Program Kemaslahatan BPKH:

1. Undang Undang No.34 tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2018
3. Peraturan BPKH No.7 tahun 2018
4. Peraturan BPKH No.2 tahun 2019
5. Peraturan Kepala BPKH No.2 tahun 2018

Pilar Program Kemaslahatan





Mekanisme Perancangan Program

Program Kemaslahatan dirancang dengan mempertimbangkan isu serta kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan manfaat DAU dapat tersalurkan secara adil dan efektif dalam mendorong kemaslahatan umat.

Setiap pihak, baik lembaga pemerintah, mitra kemaslahatan, maupun masyarakat dapat berpartisipasi dalam merancang program kemaslahatan.

Partisipasi dapat dilakukan dengan mengajukan proposal kegiatan kemaslahatan yang dibutuhkan kepada Bidang Kemaslahatan BPKH melalui situs www.bpkh.go.id. Proposal yang masuk akan menjalani mekanisme seleksi dengan skema yang mengacu pada standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Kegiatan Kemaslahatan dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan dan alokasi pagu anggaran per asnaf Kemaslahatan yang ditetapkan oleh BPKH atas hasil koordinasi dengan Kementerian Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Distribusi kegiatan Kemaslahatan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan banyaknya jemaah haji tunggu yang ada pada tiap provinsi.

Sepanjang tahun 2019 Bidang Kemaslahatan telah menerima 321 proposal, 81 diantaranya disetujui dan telah ditindaklanjuti. Sementara proposal yang tidak disetujui, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

321

**Proposal
yang diterima
sepanjang tahun
2019**

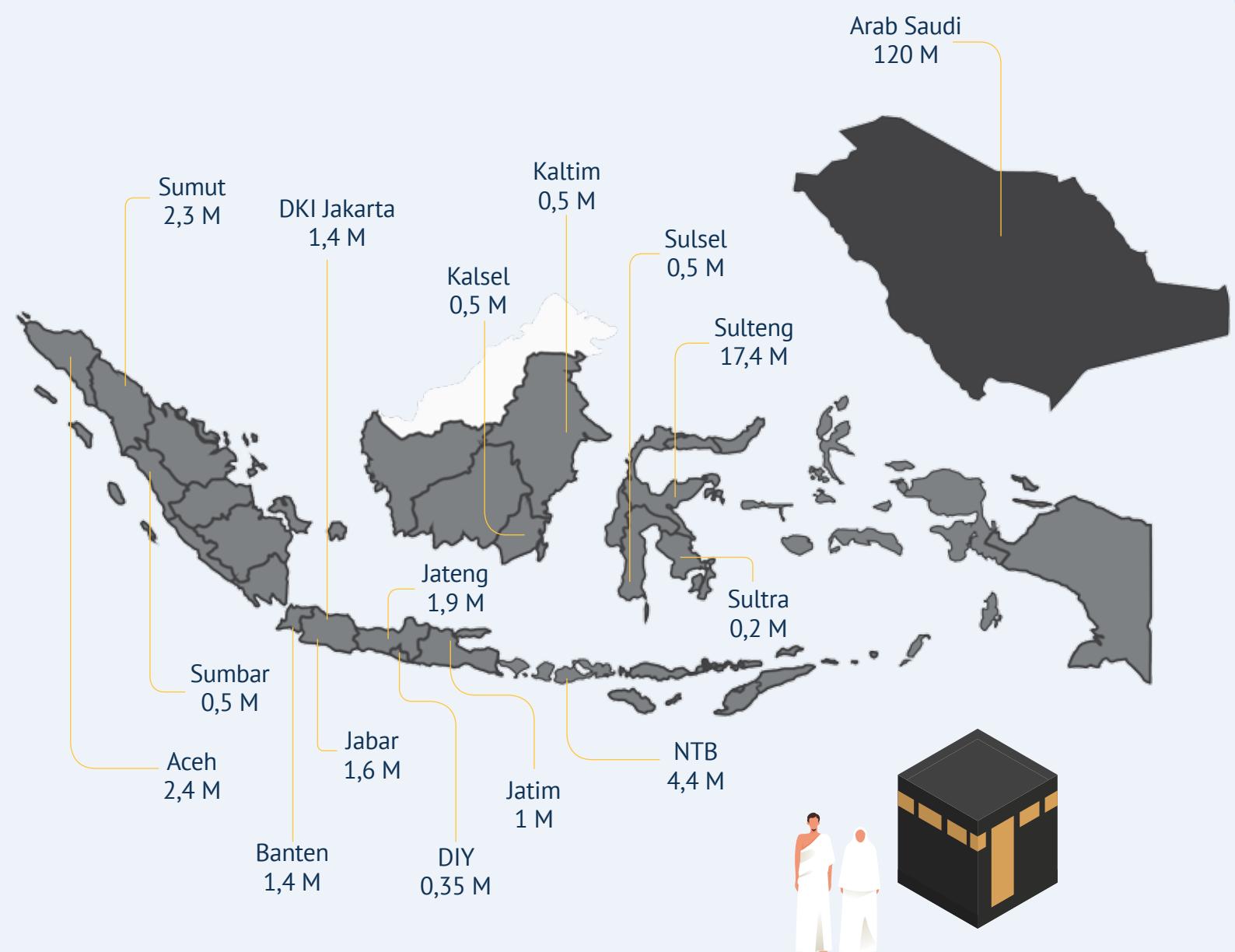
81

**Proposal yang
disetujui**

**Rp.156,54
miliar**

**Dana yang
disalurkan atas
proposal yang
disetujui**

Sebaran Wilayah dan Dana Pelaksanaan Program Kemaslahatan 2019





Ruang Lingkup Program Kemaslahatan

Implementasi dari lima pilar Program Kemaslahatan diwujudkan dalam penyaluran nilai manfaat DAU yang didistribusikan ke 6 (enam) kelompok kegiatan atau asnaf kemaslahatan.

Bidang Kemaslahatan BPKH terus berupaya meluaskan jangkauan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Sepanjang tahun 2019, Program Kemaslahatan dilakukan untuk lima dari enam asnaf yang dimandatkan yakni, Pelayanan Haji, Pendidikan dan Dakwah, Sarana

Prasarana Ibadah, Kesehatan dan Sosial Keagamaan. Sementara asnaf Ekonomi Umat masih menjadi tantangan bagi Bidang Kemaslahatan.

Sebagai lembaga yang baru dibentuk setahun lalu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) masih perlu menyusun dan menyempurnakan beberapa alat kelengkapan peraturan atau regulasi yang menjadi dasar hukum dan teknis pelaksanaan kinerja lembaga. Salah satu yang masih dalam proses penyempurnaan adalah regulasi yang mengatur petunjuk teknis penyaluran nilai manfaat Dana Abadi Umat.



**Sebaran Nilai Manfaat per Asnaf
Tahun 2019 (Rp)**



Pada September 2019 disahkan Peraturan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (PBPKH) Nomor 2/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (DAU).

Peraturan terbaru tersebut mengatur persyaratan mitra untuk pelaksanaan Program Kemaslahatan asnaf Ekonomi Umat adalah badan/lembaga zakat yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama dan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). Hingga Desember 2019, selain belum adanya proposal yang diterima terkait kegiatan Ekonomi Umat, Bidang Kemaslahatan masih menjajaki sejumlah kerjasama dengan BUS/UUS yang berpotensi untuk dapat menjadi Mitra Kemaslahatan.

Bidang Kemaslahatan BPKH telah menyalurkan dana kemaslahatan sebesar Rp 156, 54 miliar. Sebagian besar dana tersebut atau sekitar 84% dengan total nilai sebesar Rp131 miliar dialokasikan untuk mendukung kegiatan/asnaf pelayanan haji di dalam maupun di luar negeri.

Pada tahun 2019, alokasi terbesar difokuskan pada program bantuan fasilitas akomodasi bagi jemaah haji lansia di Arab Saudi. Sementara sisanya terdistribusi ke asnaf kemaslahatan lainnya.

Berikut adalah Program Kemaslahatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019.

PELAYANAN IBADAH HAJI (84%)	PENDIDIKAN DAN DAKWAH (2%)	SARANA PRASARANA IBADAH (4%)	KESEHATAN (9%)	SOSIAL KEAGAMAAN (0,5%)
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitas pelayanan haji bagi jemaah lansia di Arab Saudi Rehabilitasi/renovasi 4 UPT Asrama Haji Pengadaan kendaraan operasional di 11 UPT Asrama haji Pelaksanaan manasik haji di 7 kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan ruang kelas 9 sekolah Islam dan 8 pondok pesantren di 5 provinsi Pengadaan fasilitas penunjang pendidikan/IT berupa 40 laptop untuk 2 sekolah di 2 provinsi Pengadaan buku perpustakaan Pembangunan 1 lab komputer 	<ul style="list-style-type: none"> Renovasi 13 masjid di 5 provinsi Hibah <i>sound system</i> untuk masjid di 3 provinsi Pembangunan fasum/bencana Palu berupa rumah ramah gempa dan fasilitas sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Khitanan massal Pengadaan ambulans di 3 provinsi Pembangunan klinik kesehatan Pemberian MPASI/bantuan kesehatan bagi pengungsi gempa Lombok Renovasi klinik kesehatan di 2 provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Pembekalan santri Seminar pranikah Peringatan hari besar Islam Santunan anak yatim

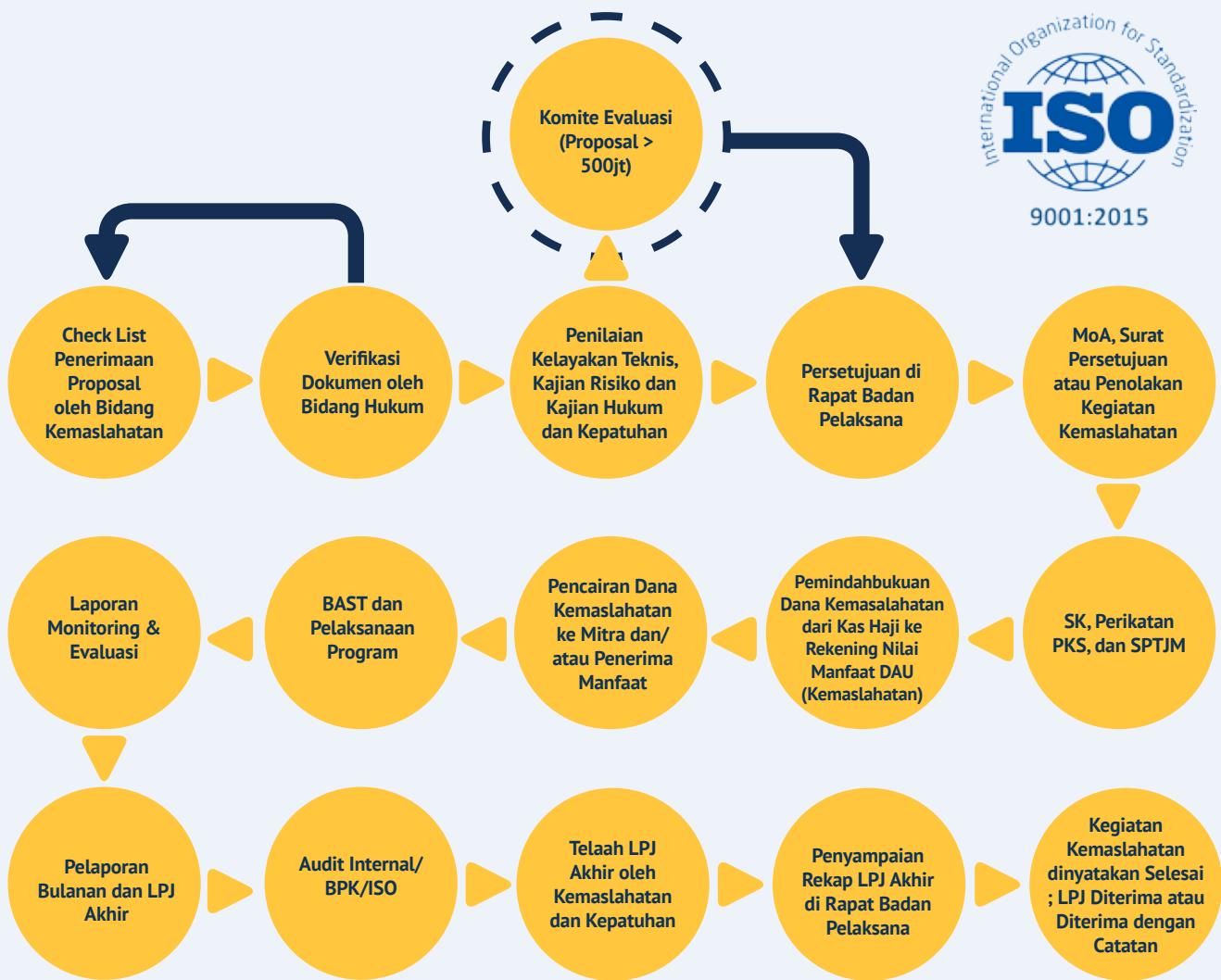


Evaluasi Pelaksanaan Program Kemaslahatan

Bidang Kemaslahatan BPKH memastikan efektivitas program yang telah dilaksanakan. Indikator kinerja untuk setiap program ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami atas dana yang telah disalurkan.

Bidang Kemaslahatan berupaya untuk memastikan terjadinya dampak positif sekaligus meminimalisir dampak negatif dari Program Kemaslahatan yang dijalankan. Mencakup evaluasi terhadap dampak kesehatan serta keselamatan penerima manfaat dari bantuan yang mereka terima. Seluruh program telah melalui evaluasi terkait hal ini.

Tata Cara Evaluasi dan Penilaian Proposal Kegiatan Kemaslahatan (BAB IV) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan (BAB V) (PKBP 3/2020)



— — — Dapat mengundang Narasumber dari luar BPKH, antara lain Mitra Kemaslahatan pengusul dan/atau penerima manfaat

Pelayanan Jemaah Haji Lansia

Dimusim haji 2019, Kerajaan Arab Saudi memberikan tambahan kuota bagi jemaah haji asal Indonesia sebanyak 10 ribu orang. Kabar baik ini sudah lama ditunggu masyarakat Indonesia, mengingat lamanya daftar tunggu keberangkatan haji di tanah air yang saat ini rata-rata mencapai 18 tahun. Pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan jemaah haji lansia untuk memenuhi kuota tambahan ini.

Dengan tambahan kuota ini, jemaah haji Indonesia meningkat dari 221.000 orang menjadi 231.000 orang. Tambahan ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah terbesar di dunia pada musim haji 2019.

Meningkatnya jumlah jemaah, maka biaya penyelenggaran haji juga bertambah. Biaya penyelenggaraan haji yang dibutuhkan pada dasarnya lebih besar dari biaya haji yang dibayarkan oleh jemaah. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, APBN hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasionalisasi petugas haji, tapi tidak untuk membiayai kegiatan dan atau keperluan yang terkait keberadaan jemaah haji selama berada di tanah suci seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi

Sejalan dengan amanat undang-undang pemanfaatan Dana Abadi Umat (DAU) yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam, maka BPKH mengambil peran sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi pembiayaan haji akibat penambahan kuota ini.

Atas persetujuan Pemerintah dan DPR, BPKH menyalurkan dana kemaslahatan sebesar Rp120 miliar untuk membantu memberikan dukungan anggaran yang diperlukan pemerintah pada musim haji 2019.

Dana tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi jemaah haji lansia di Arab Saudi melalui kegiatan Kemaslahatan ruang lingkup pelayanan ibadah haji. Sehingga mereka dapat merasa lebih nyaman dan aman selama menjalankan ibadah haji di tanah suci.

Peningkatan fasilitas untuk jemaah haji lansia juga dilakukan di tanah air. Melalui Program Kemaslahatan untuk asnaf Pelayanan Ibadah Haji. Bidang Kemaslahatan menyalurkan dana sebesar Rp11 miliar yang diantaranya dalam bentuk bantuan 11 unit mobil operasional dan kursi roda bagi calon jemaah haji lansia di 11 embarkasi serta rehabilitasi 4 asrama haji.





Kemitraan

Demi memastikan tercapainya tujuan kemaslahatan bagi umat, dalam menjalankan amanahnya Bidang Kemaslahatan BPKH juga menjalin kerjasama dengan organisasi kemaslahatan umat Islam lainnya yang ditetapkan secara resmi oleh BPKH sebagai Mitra Kemaslahatan BPKH.

Bidang Kemaslahatan memandang sinergi dengan organisasi lembaga/badan amil zakat atau wakaf di Indonesia sangat penting. Dengan menjalin komunikasi, kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga kemaslahatan umat, maka kontribusi yang dilakukan bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Kesejahteraan umat yang menjadi tujuan utama aksi organisasi umat ini akan lebih mudah terealisasi.

Untuk itu Bidang Kemaslahatan berkomitmen untuk memperluas kerjasama dan kemitraan dengan lembaga amil zakat di masa depan.

Sepanjang tahun 2019, Bidang Kemaslahatan telah menjalin kerjasama dengan 11 Mitra Kemaslahatan.

- 1. LAZISMU**
- 2. NU Care – LAZISNU**
- 3. LAZ-UQ**
- 4. DT Peduli**
- 5. Solo Peduli**
- 6. Rumah Zakat**
- 7. Laznas BSM Umat**
- 8. Mandiri Amal Insani (MAI)**
- 9. DJPHU Kemenag RI**
- 10. BAZNAS**
- 11. Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Penetapan Mitra Kemaslahatan

Tata cara pemilihan, penunjukan dan penetapan Mitra Kemaslahatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKH No.2/2019.

Syarat dan kriteria untuk menjadi Mitra Kemaslahatan ditetapkan dan disesuaikan dengan Program Kemaslahatan yang akan dijalankan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kredibilitas mitra dalam menjalankan amanah umat.

Pemantauan dan Evaluasi

Sebagai bentuk sinergi Bidang Kemaslahatan dalam menjalankan mandat menyalurkan dana kemaslahatan, hubungan kerjasama BPKH dengan Mitra Kemaslahatan diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPKH dan Mitra Kemaslahatan. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ditinjau secara berkala.



3

MEMULIHKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PASIGALA

BPKH

KAMPUNG BPKH

RUMAH SEHAT
RAMAH GEMPA, MASJID,
ORNAMEN HAJI, KLINIK,
SARANA AIR BERSIH DAN
DRAINASE LINGKUNGAN

Desa Sibolangit Utara
Kec. Tampomas Kab. Sigi

Bantuan Kemaslahatan Bencana PASIGALA

Pada 28 September 2019, bencana dahsyat gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter mengguncang Kota Palu dan tiga kabupaten lain di Sulawesi Tengah yakni, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong (PASIGALA).

Gempa besar yang memicu gelombang tsunami dan likuifaksi (pencairan tanah) ini mengakibatkan kerusakan parah dan korban jiwa yang cukup besar. Tercatat 4.194 orang meninggal dunia dan lebih dari 700 orang dinyatakan hilang. Sementara warga yang selamat terpaksa hidup dengan kondisi serba terbatas dan kesulitan air bersih di pengungsian dan tenda darurat.

Bidang Kemaslahatan BPKH hadir memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban sejak masa tanggap darurat hingga fase pemulihan kawasan dan relokasi korban. Total dana kemaslahatan yang disalurkan mencapai

Rp17,54 miliar. Bantuan ini disebarluaskan di sejumlah titik yang terdampak bencana. Aksi kemanusiaan dari Program Kemaslahatan dilakukan sejak masa tanggap darurat seperti menyalurkan bantuan makanan sehat dan alat kesehatan, serta kegiatan *land clearing/pembersihan lahan* dari puing-puing dan lumpur di Gedung IAIN Palu. Selain itu BPKH juga membangun 10 hunian sementara (hunaria), sekolah darurat hingga penyediaan sarana air bersih.

Sementara memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Program Kemaslahatan difokuskan untuk membangun sarana vital guna mempercepat pemulihan kawasan dan warga penyintas dapat melanjutkan hidup mereka sehari-hari sebagaimana mestinya.





Sinergi Bersama Mitra Kemaslahatan

Bidang Kemaslahatan BPKH mengapresiasi kerjasama yang dilakukan Mitra Kemaslahatan dalam menyalurkan dana kemaslahatan bagi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Kami meyakini sinergitas adalah modal penting dalam mencapai tujuan kemaslahatan untuk peningkatan kesejahteraan umat.

MITRA KEMASLAHATAN	NILAI DANA KEMASLAHATAN	KEGIATAN KEMASLAHATAN	FOTO
RUMAH ZAKAT	Rp. 91.100.000	Membangun sekolah darurat di Donggala Palu untuk anak-anak penyintas bencana Palu tingkat Sekolah Dasar.	
	Rp. 4.360.647.000	Pembangunan kawasan pemukiman baru terintegrasi bagi 93 Keluarga penyintas di Kabupaten Sigi yang diberi nama "Kampung BPKH".	
BAZNAS	Rp. 2.489.467.000	Renovasi sarana Kesehatan RSIA Islam Sitti Masyitah Kota Palu.	
	Rp. 622.675.000	Pengadaan mobil ambulans untuk dioperasikan sebagai klinik kesehatan keliling.	

MITRA KEMASLAHATAN	NILAI DANA KEMASLAHATAN	KEGIATAN KEMASLAHATAN	FOTO
MANDIRI AMAL INSANI	Rp. 192.070.000	Pembangunan 10 unit rumah ramah gempa dan memasang 2 sarana air bersih di Palu, Donggala, dan Sigi.	
DT PEDULI	Rp. 5.011.389.000	Pembangunan 100 unit rumah bagi keluarga penyintas di Kabupaten Donggala yang juga disebut 'Kampung BPKH'.	
	Rp. 2.004.658.000	Pembangunan kembali masjid Al Ikhlas di Pantoloan Kota Palu.	
LazisMu	Rp2.766.798.000	Pembangunan Masjid Nur Ilahi	



Kampung BPKH

Kampung BPKH merupakan program bantuan terintegrasi bagi korban penyintas bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Sigi dan Donggala.

Kawasan yang diberi nama Kampung BPKH ini menyediakan fasilitas tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana vital yang mendukung kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga penyintas yang direlokasi ketempat baru dapat hidup bermasyarakat dengan aman, nyaman dan sejahtera.

Di Kabupaten Sigi, Kampung BPKH didirikan di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Di kawasan ini BPKH membangun 93 unit rumah sehat dan ramah gempa, masjid, klinik kesehatan dan sarana air bersih serta taman ornamen haji.

Tidak berhenti pada bantuan yang bersifat fisik, BPKH juga memberikan pelatihan kewirausahaan bagi warga yang direlokasi ke pemukiman baru itu. Diharapkan pelatihan kewirausahaan itu dapat memotivasi warga agar dapat hidup mandiri kembali dalam menjalankan usaha.

Sementara di Kabupaten Donggala, Kampung BPKH terdiri atas 100 unit hunian, klinik, balai latihan kerja, sarana air bersih serta fasilitas taman berbentuk Ka'bah yang dapat dinikmati masyarakat di Desa Lero, Kecamatan Sindue.

Masyarakat terlibat secara aktif selama pembangunan Kampung BPKH di Donggala. Lebih dari 50% pembangunan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Ini merupakan bentuk komitmen penerima manfaat dan akan menimbulkan rasa tanggung jawab untuk terus memelihara Kampung BPKH menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni.



4

MENGOPTIMALKAN INSAN KEMASLAHATAN



Keppegawaiian

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat vital bagi suatu organisasi, begitu juga bagi Bidang Kemaslahatan. BPKH sebagai lembaga yang menjadi naungan Bidang Kemaslahatan memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

Pengelolaan SDM di BPKH berada di bawah Deputi SDM dan Pengadaan dengan supervisi dari Anggota Badan Pelaksana Bidang SDM dan Pengadaan. Berdasarkan rencana strategis tahun 2018-2022, Bidang SDM memiliki 3 (tiga) program kerja yaitu :

1

Strategi dan pengembangan SDM

2

Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM

3

Pembayaran penghasilan dan tunjangan

Dalam hal rekrutmen, BPKH memberikan peluang yang sama serta memperlakukan secara adil dan setara terhadap calon pegawai. Penilaian dilakukan berdasarkan pertimbangan keunggulan kompetensi dalam memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Jumlah pegawai pada Bidang Kemaslahatan masih tergolong minim apabila dilakukan *benchmark* terhadap lembaga filantropi dan/atau CSR sejenis yang menjalankan program penyaluran bantuan dan kegiatan sosial dengan besaran dana penyaluran yang dikelola. Dalam melaksanakan kegiatan operasional selama periode 2019, Bidang Kemaslahatan mengandalkan pada 6 (enam) insan kemaslahatan yang secara total kami miliki, sebagai motor penggerak Program Kemaslahatan.

Manajemen waktu kerja menjadi tantangan dengan minimnya jumlah SDM yang kami miliki. Namun hal ini tidak menjadi penghalang untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang dapat kami lakukan dalam memberikan Kemaslahatan bagi umat Islam. Melalui komunikasi yang baik, menjaga hubungan sosial antar individu, serta menanamkan tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, mampu membuat tim Kemaslahatan untuk bekerja secara optimal.

Sesuai dengan Peraturan BPKH Nomor 10 tahun 2018, seluruh pegawai dilakukan penilaian atas kinerjanya. Penilaian dilakukan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Selama periode tahun 2019 seluruh insan Kemaslahatan telah dievaluasi.

BPKH menghargai seluruh pegawainya, hal ini ditunjukkan dengan memenuhi kewajiban atas remunerasi dan fasilitas yang berhak diterima oleh pegawai BPKH sesuai dengan peraturan BPKH yang berlaku.



Jumlah Pegawai Bidang Kemaslahatan

JUMLAH PEGAWAI	2019		2018	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Berdasarkan usia				
< 30 tahun	0	2	0	1
30 – 50 tahun	4	0	3	0
> 50 tahun	0	0	0	0
Berdasarkan status ketenagakerjaan				
Permanen	4	1	3	1
Non-permanen	0	1	0	0
Subkon	0	0	0	0
Berdasarkan jabatan				
Deputi	1	0	1	0
Kadiv	1	0	1	0
Staff	2	2	1	1
Berdasarkan pendidikan				
> S2	1	0	1	0
S1 – S2	3	1	2	1
< S1	0	1	0	0

DESKRIPSI	2019		2018	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Pegawai baru				
- < 30 tahun	0	1	0	1
- 30 – 50 tahun	1	0	3	0
- > 50 tahun	0	0	0	0

Pengembangan SDM

Kompetensi yang dimiliki merupakan faktor kunci bagi seseorang untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan. Karenanya, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian dari rencana strategis SDM BPKH tahun 2018 – 2022.

Di tahun 2019, BPKH telah menyusun Program Pelaksanaan Diklat/Pengembangan SDM bagi seluruh pegawai. Program ini disusun berdasarkan pertimbangan kompetensi yang dibutuhkan BPKH untuk memiliki SDM yang handal dan berkualitas.

Ruang lingkup pengembangan yang dilaksanakan tidak hanya mencakup keahlian teknis namun juga untuk meningkatkan kapasitas *soft skill*. Dengan demikian insan Bidang Kemaslahatan diharapkan memiliki kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal pengambilan keputusan, penyelesaian masalah dan menghasilkan output yang lebih berkualitas.

Bidang Kemaslahatan juga membangun budaya terus belajar bagi insan Kemaslahatan. Karena Kami meyakini adanya korelasi positif antara budaya belajar dengan tingkat kinerja.

Insan Kemaslahatan didorong untuk memperluas pengetahuan dan ketrampilan, tidak hanya melalui program pengembangan/diklat yang telah ditetapkan, namun Kami juga membuka peluang bagi pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan lain yang dapat mendorong kinerja mereka.

Selain itu kami juga menanamkan pentingnya untuk belajar dari lembaga-lembaga nirlaba lainnya yang sejenis. Hal ini akan memperluas wawasan, membantu dalam beradaptasi terhadap tantangan yang dihadapi serta memberi inspirasi untuk memanfaatkan peluang yang muncul.





RATA-RATA JAM PELATIHAN	2019		2018	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Level manajemen	48 jam	-	-	-
Level karyawan non manajemen	32 jam	32 jam	16 jam	16 jam

5

**TATA
KELOLA**



Tata Kelola

Sebagai salah satu bidang yang berada dalam lingkup lembaga BPKH, Bidang Kemaslahatan memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap penerapan tata kelola yang berlaku di BPKH.

BPKH meyakini bahwa implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik merupakan faktor penting untuk menjadi sebuah lembaga pengelola keuangan yang terpercaya dan dapat memberikan nilai manfaat yang maksimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat.

BPKH berkomitmen untuk mematuhi penerapan tata kelola yang baik sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, undang-undang dan peraturan lainnya. Pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan tanggung jawab seluruh jajaran BPKH untuk membangun lembaga yang sehat, tangguh dan memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Evaluasi terhadap penerapan tata kelola yang baik dilakukan secara berkala. Sistem *reward* dan *punishment* diterapkan kepada unit kerja maupun individu atas penerapan nilai-nilai dari prinsip tata kelola yang baik.

Penilaian dilakukan oleh Bidang Kepatuhan atau pihak independen lain sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Asas Pengelolaan Keuangan Haji

BPKH berupaya untuk menjadi lembaga yang terpercaya dan dapat memberikan manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan DAU yang merupakan bagian dari Dana Haji yang diamanahkan pengelolaannya kepada BPKH, menerapkan prinsip-prinsip dan asas yang diatur dalam Peraturan BPKH nomor 3 tahun 2018, yaitu :

1. Prinsip Syariah
2. Prinsip Kehati-hatian
3. Asas Manfaat
4. Asas Nirlaba
5. Asas Transparan, dan
6. Asas Akuntabel

Organ Tata Kelola

Struktur tata kelola yang memadai dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tata kelola. BPKH memiliki organ-organ utama tata kelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No.110 tahun 2017, yang terdiri dari :

1. Dewan Pengawas, merupakan organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban dan pelaporan Keuangan haji, dan
2. Badan Pelaksana, merupakan organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban dan pelaporan Keuangan haji.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang individu maupun kolektif dari organ-organ ini memiliki peranan penting dalam kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional lembaga.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing organ tata kelola dapat dilihat pada Laporan Tahunan BPKH pada Bab Tata Kelola.

Pengembangan Tata Kelola

Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi organ tata kelola dan unit kerja lainnya di bidang keberlanjutan, BPKH memfasilitasi pelatihan yang relevan dengan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola. Pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan organ tata kelola sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada Bab Tata Kelola *Annual Report* 2019 BPKH.



Organ Tata Kelola

DEWAN PENGAWAS



**Dr. Yuslam Fauzi, SE,
MBA**
Ketua & Anggota



Khasan Faozi, SE, M.Si
Anggota



Moh. Hatta, Ak., MBA
Anggota



Dr. KH Marsudi Syuhud
Anggota



Ir. Suhaji Lestiadi, ME
Anggota



**Dr. Muhammad Akhyar
Adnan, MBA, CA, Ak**
Anggota



**Dr. Abd Hamid Paddu,
MA**
Anggota

BADAN PELAKSANA



**Dr. Anggito Abimanyu,
MSc**
Kepala BPKH & Anggota



**Dr. Ir. Acep Riana
Jayaprawira, M.Si**
Anggota



**Dr. Beny Witjaksono, S.P.,
MM**
Anggota



**A. Iskandar Zulkarnain,
SE, MM**
Anggota



Ir. Ajar Susanto Broto, MM
Anggota



**Dr. Rahmat Hidayat, SE,
MT**
Anggota



**Dr. Hurriyah El Islamy,
LLB (hons), M.Cl, Ph.D**
Anggota

Manajemen Risiko

Dalam setiap kegiatan dan keputusan yang diambil BPKH terdapat sejumlah risiko yang melekat. Tidak terkecuali pada aktivitas operasional Bidang Kemaslahatan. Untuk itu BPKH melakukan pendekatan terstruktur dalam mengelola risiko agar dapat meminimalisir dampak negatif yang berpotensi terjadi.

Sesuai Peraturan BPKH no 3 tahun 2018, BPKH membentuk Bidang Manajemen Risiko yang terdiri dari 2 (dua) divisi, yaitu Divisi Manajemen Risiko Bisnis dan Divisi Manajemen Risiko Korporasi.

Sebagai panduan dalam mengelola risiko, pedoman manajemen risiko disusun dan ditinjau minimal setiap 2 (dua) tahun sekali atau jika terjadi perubahan visi, misi dan sasaran manajemen risiko.

Pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab dari masing-masing Anggota Bidang sebagai pemangku risiko, termasuk Bidang Kemaslahatan.

Jenis risiko yang dikelola mencakup :

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Kepatuhan
6. Risiko Stratejik
7. Risiko Hukum
8. Risiko Reputasi
9. Risiko Investasi
10. Risiko Imbal Hasil

Kode Etik

Bidang Kemaslahatan harus patuh dan tunduk pada Kode Etik yang ditetapkan oleh BPKH. Kode etik ini bertujuan untuk menciptakan standar perilaku yang baik secara moral dan profesional dalam melaksanakan tugas untuk dan atas nama lembaga, maupun dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesama rekan kerja, dengan atasan maupun bawahan.

Pedoman Etika Kerja yang dimiliki BPKH menjadi sarana untuk membentuk budaya kerja yang positif. Pedoman ini memberikan acuan perilaku yang harus dilakukan oleh Anggota Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan setiap pegawai BPKH dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

Prinsip umum Etika Kerja antara lain mencakup :

1. Tanggung jawab dalam memberikan manfaat, tidak terbatas pada jemaah haji, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan BPKH.
2. Dampak kegiatan tidak terbatas pada pengelolaan keuangan haji, tetapi mencakup kontribusi dalam menciptakan keadilan, hak asasi manusia, pendidikan, inovasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan efektif.
3. Kegiatan operasional tidak sekedar mematuhi hukum dan peraturan, namun juga memenuhi semangat dan jiwa dari peraturan tersebut serta menjaga prinsip saling mempercayai dan beretika.
4. Menghargai lingkungan hidup, melalui kegiatan yang melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.
5. Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.



Anti Korupsi

Kebijakan anti korupsi telah diatur dalam Peraturan BPKH no.3 tahun 2018. Peraturan tersebut mengatur larangan penerimaan dan pemberian gratifikasi dalam bentuk dan keadaan apapun untuk mempengaruhi pegawai BPKH melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitas jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan /atau independensi dan obyektifitas dalam pengambilan keputusan.

Pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari penerapan tata kelola yang baik yang menjadi tanggung jawab Bidang Kepatuhan. Setiap pelanggaran yang terjadi dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran lisan, hingga penyerahan kepada pihak berwajib sesuai dengan ketentuan pada peraturan BPKH no.3 tahun 2018.

Selama tahun 2019, tidak terdapat laporan pelanggaran penerimaan maupun pemberian gratifikasi yang dilakukan oleh insan BPKH, termasuk Bidang Kemaslahatan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

BPKH memiliki komitmen untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Komitmen ini ditunjukkan melalui Peraturan BPKH nomor 8 tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan BPKH.

Peraturan tersebut mewajibkan Penyelenggara Negara yaitu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas serta pegawai BPKH untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya.

BPKH juga membentuk Unit Pengelola LHKPN yang terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator dan Administrator yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan wajib LHKPN.

100%

Jumlah pejabat dan pegawai yang telah mendapat pelatihan terkait kebijakan anti korupsi

KEPATUHAN LHKPN

8

Wajib Lapor*



100%

Kepatuhan

***Wajib lapor:**
1 orang Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan



1 orang Anggota Dewan Pengawas Bidang Kemaslahatan



6 orang pegawai Bidang Kemaslahatan

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi atas aktivitas maupun keputusan lembaga.

BPKH menyediakan sarana untuk memberikan kritik, pengaduan atau saran yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya setiap pelaporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mekanisme sistem pelaporan dan jumlah pelaporan yang diterima sepanjang tahun 2019, dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Annual Report 2019 BPKH.





Pelibatan Pemangku Kepentingan

Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program untuk mencapai tujuannya yaitu kemaslahatan umat Islam. Melalui pelibatan pemangku kepentingan, Bidang Kemaslahatan merumuskan program-program dan membuat kebijakan dalam menjalankan aktivitasnya dengan penuh tanggung jawab.

Bidang Kemaslahatan menidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan pertimbangan atas pengaruh dan dampak terhadap Program Kemaslahatan.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	KEPENTINGAN DAN HARAPAN/ISU YANG RELEVAN	METODE DAN FREKUENSI KETERLIBATAN
1.	Badan Pelaksana BPKH	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana sesuai target - Keberlanjutan program - Kepatuhan peraturan - Eksistensi BPKH (syiar dan <i>branding</i>) 	Rapat badan pelaksana (1 x / minggu) Rakor dengan anggota badan pelaksana (setiap hari)
2.	Dewan Pengawas BPKH	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana sesuai target - Keberlanjutan program - Kepatuhan peraturan - Eksistensi BPKH (syiar dan <i>branding</i>) 	Rapat gabungan (1x/bulan) Laporan bulanan
3.	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Program prioritas - Program pendukung pelaksanaan ibadah haji 	Rapat prioritas (awal tahun, atau saat ada perubahan)
4.	Komisi VIII DPR	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana - Program 	Laporan, Alokasi besaran anggaran Usulan program (proposal)
5.	Mitra Kemaslahatan (Lembaga non profit)	<ul style="list-style-type: none"> - Program - Sumber dan jumlah penggunaan dana 	Rapat Koordinasi
6.	Penerima Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> - Program 	Sosialisasi
7.	Kementerian Keuangan	Sumber penempatan dana dan jumlah dana	Rapat penempatan DAU (1x per tahun)
8.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Program - Sumber dan jumlah penggunaan dana 	Sosialisasi Mempublikasi kegiatan di berbagai media
9.	Presiden	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana - Kepatuhan peraturan 	Laporan melalui Kementerian Agama
10.	Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Work life balance</i> - Tata Kelola - Transparansi - Penilaian kinerja - Pengembangan 	Gathering, pelatihan

6

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN



Tentang Laporan Keberlanjutan

Profil Laporan

Laporan ini merupakan Laporan Keberlanjutan Program Kemaslahatan selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2019. Laporan Keberlanjutan yang kedua ini mengangkat tema “Sinergi Untuk Kemaslahatan Umat”.

Laporan Keberlanjutan ini disusun mengikuti Standar Laporan Keberlanjutan dari Global Reporting Initiative (GRI). Bidang Kemaslahatan BPKH bukanlah lembaga yang yang diwajibkan menerbitkan laporan keberlanjutan, namun laporan ini juga disusun merujuk pada Lampiran II Peraturan Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Bidang Kemaslahatan BPKH menerbitkan laporan ini setiap tahun dengan tujuan untuk memberikan informasi secara transparan mengenai upaya yang kami lakukan dalam memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat Islam.

Ruang Lingkup dan Batasan

Fokus utama dalam laporan ini adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH, termasuk kegiatan yang dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hal ini juga merupakan perubahan yang terjadi dalam laporan. Berbeda dengan laporan periode 2018 yang mencakup lembaga BPKH yang lebih luas.



Kontak

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan, kami terbuka untuk setiap masukan, saran ataupun pertanyaan, yang dapat ditujukan ke :

BIDANG KEMASLAHATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)



Menara Bidakara 1, lantai 8 Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia



Telp : (021) 83793001



Call Center Kemaslahatan : 08882298820



Email : kemaslahatan@bpkh.go.id



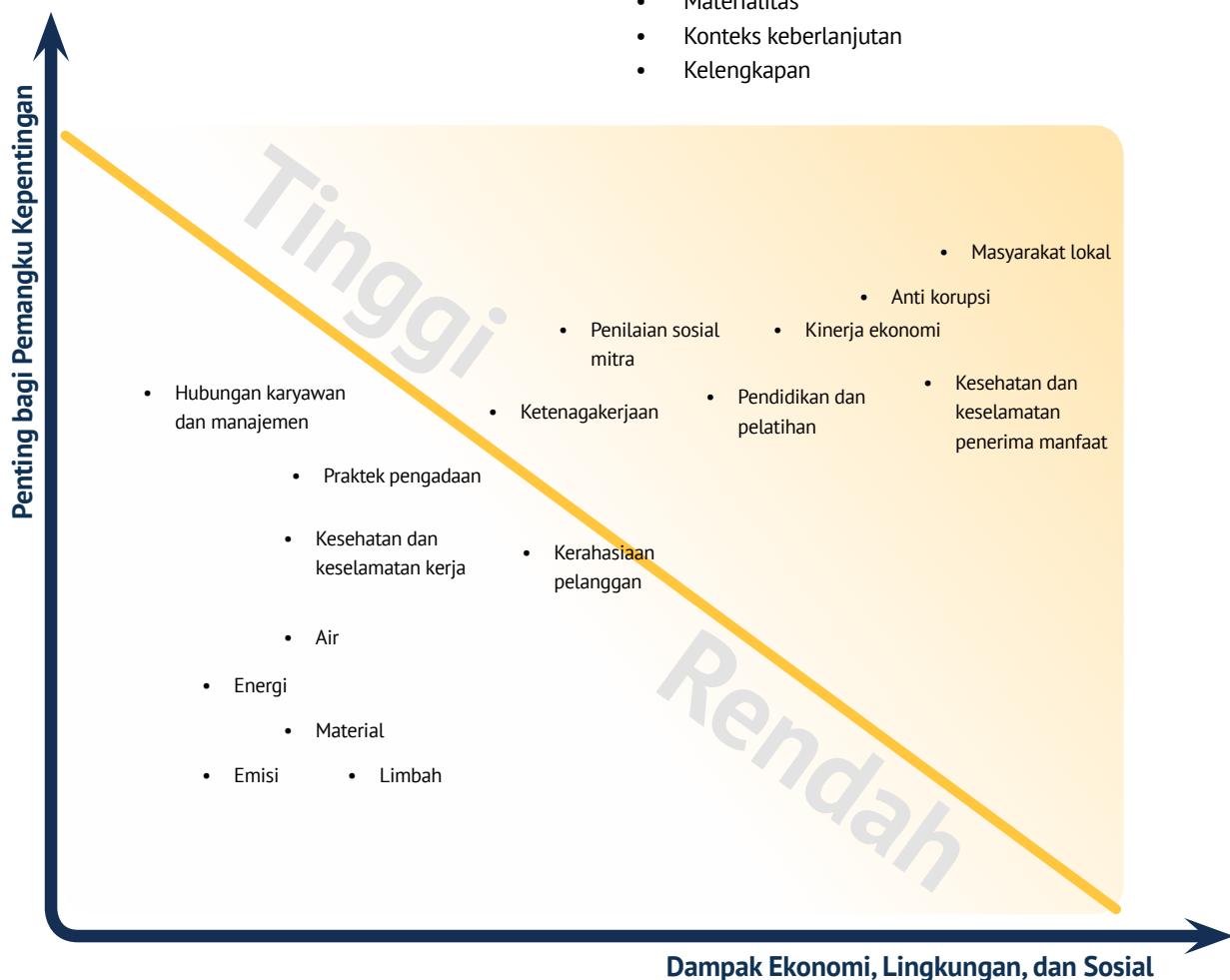
Kandungan Laporan dan Materialitas

Penentuan Kandungan Laporan

Penentuan kandungan laporan keberlanjutan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip penentuan kandungan

laporan sesuai dengan ketentuan Standar GRI, yang mencakup:

- Pelibatan pemangku kepentingan
- Materialitas
- Konteks keberlanjutan
- Kelengkapan



Topik Material dan Batasannya

Kami melakukan peninjauan kembali topik-topik material yang kami sajikan tahun lalu. Tujuannya adalah untuk menentukan informasi material yang paling relevan untuk kami sajikan kepada para pemangku kepentingan.

Hal ini merupakan sebuah proses peningkatan berkesinambungan atas laporan kami di tahun sebelumnya.

Proses peninjauan dilakukan secara internal, melibatkan para penanggungjawab yang relevan dengan topik yang kami bahas.

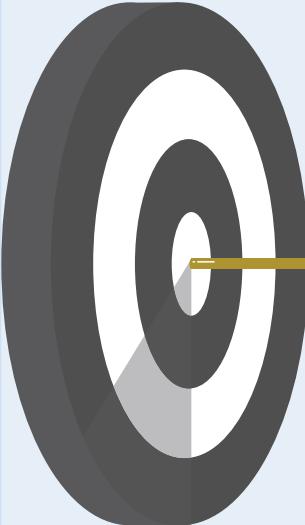
Berdasarkan hasil dari *workshop* dan *focus group discussion* (FGD), ditentukanlah topik relevan yang menjadi topik material sesuai dengan matriks diatas. Topik material yang dipilih adalah topik yang berada pada kuadran tinggi dalam tingkat materialitas



Topik Material dan Batasannya

TOPIK MATERIAL	MENGAPA MATERIAL	STANDAR GRI	BATASAN			
			BIDANG KEMASLAHATAN	BPKH	MASYARAKAT	MITRA
Masyarakat lokal	Program kemaslahatan ditujukan untuk masyarakat lokal, khususnya umat Islam	413	●	●	●	
Kinerja ekonomi	Salah satu fokus perhatian Pemangku Kepentingan dan Bidang Kemaslahatan	201	●	●	●	
Anti korupsi	Bagian dari tata kelola lembaga yang harus diterapkan di seluruh manajemen dan pegawai	205	●	●	●	
Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat	Tujuan program adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat, kesehatan dan keselamatan tentunya menjadi bagian dari hal ini	416	●	●	●	
Penilaian sosial mitra	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kemaslahatan merupakan kegiatan sosial yang spesifik untuk kemaslahatan umat. Maka penting bagi lembaga untuk bekerja sama dengan mitra yang memiliki visi yang sama.	414	●	●		●
Pendidikan dan pelatihan	Memiliki pegawai dengan kompetensi yang mumpuni memungkinkan kegiatan dapat dilakukan secara optimal	404	●			
Ketenagakerjaan	Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting bagi lembaga sebagai penggerak kegiatan Program Kemaslahatan	401	●			

PROYEKSI PROGRAM KEMASLAHATAN TAHUN 2020



Pada tahun 2020, Bidang Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk kemaslahatan umat. Semangat sinergi bersama Mitra Kemaslahatan akan tetap diwujudkan dan dikokohkan dalam melaksanakan kegiatan kemaslahatan secara bersama di 6 Ruang Lingkup Program Kemaslahatan.

Namun pada penghujung tahun 2019 ini, suatu tantangan dan kondisi memicu kekhawatiran secara meluas di berbagai belahan dunia demikian halnya dengan di Indonesia. Menurut WHO, kasus pertama COVID-19 yang dikonfirmasi di Tiongkok pada 8 Desember 2019. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia tersebut tidak melakukan pelacakan terhadap penyakit, melainkan bergantung pada negara-negara untuk memberikan informasi. Sebuah laporan yang diterbitkan dalam jurnal medis *The Lancet*, salah satu dokter di Rumah Sakit Jinyintan Wuhan, yang merawat beberapa pasien paling awal, menyebutkan bahwa tanggal infeksi pertama diketahui pada 1 Desember 2019. Tes menunjukkan, seorang pasien di RS Pusat Wuhan didiagnosis tertular virus corona yang belum diketahui pada 16 Desember 2019. Kendati begitu, komunitas medis di Wuhan tampaknya sadar akan penyakit tersebut pada akhir Desember 2019.

Wabah penyakit dari Virus COVID-19 yang muncul di Provinsi Wuhan, Tiongkok, berpotensi terus meluas dan menimbulkan dampak bencana yang tidak ringan. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengkhawatirkan kejadian ini dapat memicu wabah penyakit secara meluas atau selanjutnya disebut pandemi di seluruh dunia. Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia tidak tertutup kemungkinan akan turut terdampak adanya wabah penyakit dari virus COVID-19 ini.

Bidang Kemaslahatan BPKH didalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan 2020 mengalokasikan 10 % Anggaran Program Kemaslahatan tahun 2020 untuk Kedaruratan Penanganan Dampak Bencana. Hal ini bukan kali pertamanya Bidang Kemaslahatan BPKH mengambil peranan aktif dalam penanganan dampak bencana sebagaimana telah dilakukan pada periode 2018 dalam penanganan darurat dampak bencana tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala (PASIGALA) dan memberikan bantuan ruang lingkup Kesehatan, Sosial Keagamaan dan Pendidikan dan Dakwah. Pada tahun 2019 ini dilanjutkan berperan aktif dalam pemulihan pasca bencana PASIGALA dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu Kesehatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah. Belajar dari 2 tahun dalam mengambil peranan penanganan dampak bencana maka Bidang Kemaslahatan BPKH lebih mematangkan diri dalam menghadapi tantangan bencana yang tidak dapat dihindarkan baik berupa wabah penyakit ataupun bencana alam. Hal ini menjadi dasar pemikiran dalam perencanaan anggaran kedaruratan penanganan dampak bencana yang dialokasikan untuk ruang lingkup Kesehatan dan Sosial Keagamaan yaitu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak melalui bantuan pangan/sembako dan/atau bantuan langsung tunai, juga memberikan bantuan dukungan kepada pemerintah dalam upaya penanganan dampak wabah penyakit dari Virus COVID-19 di bidang kesehatan berupa bantuan peralatan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, Bidang Kemaslahatan BPKH akan turut melibatkan Mitra Kemaslahatan secara aktif mulai dari kondisi tanggap darurat bencana, penilaian dan verifikasi bencana, penyusunan usulan bantuan bencana, pengadaan barang bantuan bencana, pendistribusian bantuan bencana, turun ke lapangan dan membantu secara aktif masyarakat yang terdampak bencana, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Peranan aktif yang dilakukan Bidang Kemaslahatan BPKH bahu membahu bekerjasama dengan Mitra Kemaslahatan didalam upaya penanganan dampak bencana diharapkan dapat meringankan beban penderitaan yang dialami masyarakat terdampak bencana dan/atau masyarakat terdampak wabah penyakit dari Virus COVID-19.

Indeks Standar GRI

	PENGUNGKAPAN	HALAMAN
GRI 102:	PROFIL ORGANISASI	
Pengungkapan Umum	102-1 Nama organisasi	13
	102-2 Merek, produk, dan jasa utama	13
	102-3 Lokasi kantor pusat	13
	102-4 Jumlah negara tempat operasi	13
	102-5 Sifat kepemilikan dan badan hukum	13
	102-6 Pasar yang dilayani	13
	102-7 Skala organisasi	13
	102-8 Informasi terkait karyawan dan pekerja lain	13
	102-9 Rantai pasokan organisasi	29
	102-10 Perubahan signifikan selama periode pelaporan	Tidak ada
	102-11 Prinsip kehati-hatian	46
	102-12 Inisiatif Eksternal	Tidak ada
	102-13 Keanggotaan asosiasi	Tidak ada
	STRATEGI	
	102-14 Pernyataan dari manajemen puncak	6
	ETIK DAN INTEGRITAS	
	102-16 Nilai-nilai, standar dan norma-norma perilaku	22
	102-17 Mekanisme permintaan nasihat dan pertimbangan terkait etik	46
	TATA KELOLA	
	102-18 Struktur tata kelola	45
	PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
	102-40 Daftar kelompok pemangku kepentingan	49
	102-41 Perjanjian Kerja Bersama	Mengikuti peraturan yang berlaku di lembaga pemerintahan
	102-42 Identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan	49
	102-43 Pendekatan untuk melakukan pelibatan pemangku kepentingan	49
	102-44 Topik dan perhatian utama	53
	PRAKTIK PELAPORAN	
	102-45 Entitas yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian	52
	102-46 Proses untuk menetapkan isi laporan dan Batasan topik	53
	102-47 Daftar topik material	54
	102-48 Pernyataan ulang atas informasi	Tidak ada
	102-49 Perubahan dalam pelaporan	52
	102-50 Periode pelaporan	52
	102-51 Tanggal laporan paling terakhir	52
	102-52 Siklus pelaporan	52
	102-53 Poin Kontak atas pertanyaan terkait laporan ini	52
	102-54 Klaim pelaporan yang 'kesesuaian dengan' Standar GRI	52
	102-55 Indeks isi GRI	55-57
	102-56 Pemeriksaan eksternal	Tidak ada

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN



		PENGUNGKAPAN	HALAMAN
		KINERJA EKONOMI	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	54
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	20-21
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	20-21
GRI 201 Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	20-21
		ANTI KORUPSI	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	47, 54
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	47
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	47
GRI 205 Anti Korupsi 2016	205-1	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi	47
		KETENAGAKERJAAN	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	38, 54
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	38
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	38
GRI 401: Ketenagakerjaan 2016	401-1	Tenaga Kerja Baru dan Turnover	38
		PELATIHAN DAN PENDIDIKAN	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	40, 54
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	40
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	41
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan	41
		MASYARAKAT LOKAL	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	25, 54
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	23, 25-26
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	27
GRI 413 Masyarakat Lokal 2016	413-1	Operasi dengan pelibatan masyarakat, penilaian dampak, dan program pengembangan	23, 26-28, 32-35



		PENGUNGKAPAN	HALAMAN
		PENILAIAN SOSIAL SUPPLIER	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	29, 54
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	29
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	29
GRI 414: Penilaian Sosial Supplier 2016	414-1	Supplier baru yang dinilai berdasarkan kriteria sosial	29
		KESEHATAN DAN KESELAMATAN PELANGGAN	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	27, 54
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	27
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	27
GRI 416: Kesehatan dan Kesela- matan Pelanggan 2016	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan produk dan jasa	27



Indeks POJK-51/2017

KRITERIA		HALAMAN
A.1	Penjelasan strategi keberlanjutan	7
A.2	Ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan	15
A.2.a	Aspek ekonomi	15
2.b	Aspek lingkungan hidup	Tidak termasuk topik material
2.c	Aspek sosial	15
3	Profil singkat organisasi	
3.a	Visi, misi dan nilai	14
3.b	Nama, alamat, nomor telepon, faksimili, alamat surat elektronik dan situs web	13
3.c	Skala usaha	13
3.d	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan dan kegiatan yang dijalankan	13
3.e	Keanggotaan pada asosiasi	Tidak ada
3.f	Perubahan signifikan	Tidak ada
4	Penjelasan direksi	6-7
4.a	Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan	6-7
4.b	Penerapan keuangan berkelanjutan	6-7
4.c	Strategi pencapaian target	6-7
5	Tata kelola keberlanjutan	
5.a	Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan	44
5.b	Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan	44
5.c	Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan	46
5.d	Penjelasan mengenai pemangku kepentingan	49
5.e	Permasalahan yang dihadapi	26
6	Kriteria keberlanjutan	
6.a	Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan	22
6.b	Uraian mengenai kinerja ekonomi	20
6.c	Kinerja sosial	26
6.d	Kinerja lingkungan hidup	Tidak termasuk topik material
6.e	Kinerja lingkungan hidup yang prosesnya berkaitan langsung dengan lingungan hidup	Tidak relevan
6.f	Tanggung jawab pengembangan produk/jasa berkelanjutan	27
7	Verifikasi, jika ada	Tidak ada

BIDANG KEMASLAHATAN



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

Menara Bidakara 1, lantai 8 Jalan Gatot Subroto,
Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

Telp : (021) 83793001
Call Center Kemaslahatan : 08882298820
Email : kemaslahatan@bpkh.go.id

www.bpkh.go.id